

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
*(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Payakumbuh)*

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**Oleh:**

**HENDRICK FERNANDA**

**02126/2008**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris pada SKPD Kota Payakumbuh)**

**Nama** : Hendrick Fernanda  
**BP/NIM** : 2008/02126  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik  
**Fakultas** : Ekonomi

**Padang, Januari 2014**

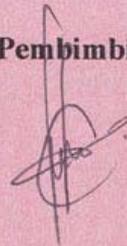
**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**



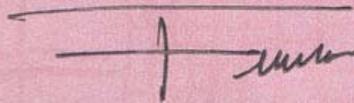
**Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak**  
NIP. 19580519 199001 1 001

**Pembimbing II**



**Charoline Cheisviyanny, SE, MSc, Ak**  
NIP. 19690610 199802 2 001

**Diketahui Oleh:  
Ketua Prodi Akuntansi**



**Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**  
NIP. 19730213 199903 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program  
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Pada tanggal 28 januari 2014*

**Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah  
Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah  
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)**

**Nama : Hendrick Fernanda**

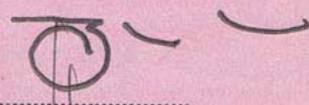
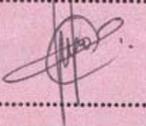
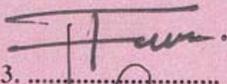
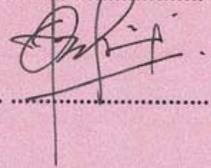
**TM/NIM : 2008/02126**

**Prog. Studi : Akuntansi**

**Fakultas : Ekonomi**

**Padang, Januari 2014**

### Tim Penguji

	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Ketua	Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	Charoline Cheisviyanny, SE, M.Sc, Ak	2. 
3. Anggota	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	3. 
4. Anggota	Halmawati, SE, M.Si	4. 

## ABSTRAK

**Hendrick Fernanda. 02126. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah (*studi empiris pada SKPD kota payakumbuh*)**

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak

II : Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : (1) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. (2) Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah SKPD di kota Payakumbuh. Sampel ditentukan berdasarkan metode *total sampling*, sebanyak 30 SKPD di kota Payakumbuh. Pengumpulan data dengan kuesioner kepada responden yaitu pegawai bagian akuntansi/keuangan SKPD. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah sebagai variabel independen, dan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah sebagai variabel dependen. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 15.0 *for windows*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pengaruh yang signifikan positif antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,491 > 1,6793$  atau nilai signifikansi  $0,001 < \alpha 0,05$  ( $H_1$  diterima). (2) Pengaruh yang signifikan positif antara pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,927 > 1,6793$  atau nilai signifikansi  $0,000 < \alpha 0,05$  ( $H_2$  diterima).

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi kantor SKPD kota Payakumbuh untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah dalam membuat laporan keuangan agar tercipta laporan keuangan yang bernilai. Selain itu juga disarankan agar memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya memperbanyak jumlah sampel dan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ” **Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah**”. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE,M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Bapak/Ibu pegawai bagian akuntansi/keuangan SKPD di kota Payakumbuh yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Kedua orang tua beserta kakak dan adik tercinta serta segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2008 dan Teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS</b> .....	11
A. Kajian Teori .....	11
1. Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	11
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	23
3. Pengawasan Keuangan Daerah .....	26
B. Penelitian Terdahulu .....	30
C. Kerangka Konseptual .....	32
D. Hipotesis Penelitian .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	36
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Populasi, Sampel, dan Responden .....	36
C. Jenis Dan Sumber Data .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Variabel Penelitian .....	40
F. Instrumen Penelitian .....	40
G. Uji Validitas Dan Reliabilitas .....	42

H. Uji Coba Instrumen.....	43
I. Uji Asumsi Klasik .....	44
J. Teknik Analisis Data .....	45
K. Definisi Operasional .....	50
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Sampel dan Responden Penelitian .....	51
B. Analisis Deskriptif .....	52
C. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian.....	62
D. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	65
E. Uji Model.....	67
F. Pengujian hipotesis .....	70
G. Pembahasan.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Keterbatasan .....	74
C. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Opini LKPD Kota Payakumbuh .....	3
2. Penelitian Terdahulu .....	30
3. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Payakumbuh.....	37
4. Skala Pengukuran.....	41
5. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .....	41
6. Nilai Cronbach's Alpha dan Corrected Item-Total Correlation.....	44
7. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner .....	51
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan ....	52
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Keahlian .....	53
10. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	54
11. Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	54
12. Statistik Deskriptif .....	55
13. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi	57
14. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pengawasan Keuangan Daerah ...	58
15. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Nilai Informasi Pelaporan .....	60
16. Nilai Corrected Item-Total.....	62
17. Nilai Corrected Item-Total Correlation terkecil setelah dibuang pernyataan yang tidak valid .....	63
18. Nilai Cronbach's Alpha .....	64
19. Nilai Cronbach's Alpha setelah dibuang pernyataan yang tidak valid	64
20. Uji Normalitas .....	65
21. Uji Multikolinearitas .....	66
22. Uji Heterokedastisitas .....	66
23. Uji Koefisien determinasi .....	67
24. Koefisien Regresi Berganda .....	68
25. Uji F .....	69

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Konseptual .....	34

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Kuesioner Penelitian.....	79
2. Tabulasi Data Pilot Test.....	84
3. Tabulasi Data Penelitian.....	87
4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Pilot Test .....	93
5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian sebelum data yang tidak valid dibuang .....	96
6. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian setelah data yang tidak valid dibuang .....	99
7. Statistik deskriptif data .....	102
8. Uji Asumsi Klasik .....	102
9. Uji hipotesis .....	103

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi

Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai (Suwardjono, 2005:165). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih belum seluruhnya disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan BPK-RI perwakilan Sumatera Barat Kota Payakumbuh tahun 2012 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK. Opini WDP diberikan BPK karena masih terjadi akun aset yang belum disajikan secara wajar ([www.padangekspres.co.id](http://www.padangekspres.co.id)).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2008 sampai tahun Anggaran 2012 kota payakumbuh mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

**Table 1**  
**Opini LKPD Kota Payakumbuh**

<b>Tahun</b>	<b>Opini</b>
2008	WDP
2009	WDP
2010	WDP
2011	WDP
2012	WDP

*Sumber : [www.padangekspres.co.id](http://www.padangekspres.co.id)*

Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2005:165). Sedangkan Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

Negara dan Daerah selama suatu periode. Dari definisi diatas dapat disimpulkan Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Menurut Jogiyanto (2011) menjelaskan bahwa informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (keterpahaman) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi yang berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif.

Menurut (Arens 2011) Pemanfaatan teknologi informasi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian internal dengan secara konsisten memproses sejumlah besar volume transaksi data sehingga teknologi informasi dapat meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi dari informasi. Peningkatan kepengendalian internal sebagai hasil pengintegrasian teknologi informasi ke dalam sistem akuntansi yaitu kendali komputer menggantikan kendali manual. Satu keuntungan teknologi informasi adalah kemampuan untuk meningkatkan pengendalian internal dengan menggabungkan kendali yang dilakukan komputer dalam aktivitas proses transaksi sehari-hari.

Karakteristik sistem informasi pelaporan keuangan yang terkomputerisasi dapat mempengaruhi jenis aktivitas pengendalian yang ditetapkan entitas, tetapi tidak boleh mempengaruhi tujuan aktivitas pengendalian itu sendiri (Guy, 2003:285). Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Widjajanto, 2001:89). Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan multiprocessing, namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah.

Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) terhadap sepuluh SKPD di Sumatera Barat tahun 2008 dan 2009, ditemukan bahwa pemahaman staf terhadap pemanfaatan teknologi dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik hardware maupun software dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya

pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi yang memadai.

Pengawasan keuangan daerah juga dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2006)

Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan yang berjalan dengan baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Dimana, pengawasan keuangan daerah merupakan salah satu komponen pengendalian internal yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu beroperasi seperti diharapkan dan mereka dimodifikasi

sesuai dengan perubahan dalam kondisi-kondisi (Arens, 2011). Dalam komponen pengendalian internal yang lain, aktivitas pengendalian, terdapat bentuk aktivitas pengendalian yaitu pemisahan tugas yang berguna untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan usaha untuk menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan tugas oleh orang-orang terkait.

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (*series of actions and on going basis*). Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar

pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

Penelitian yang dilakukan oleh Harifan (2009) tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Padang, hasil penelitian ini menunjukkan Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemda. Hal ini menunjukkan semakin baik Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengendalian Intern Akuntansi maka nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah yang dihasilkan juga semakin baik dan begitu sebaliknya semakin buruk Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengendalian Intern Akuntansi maka nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah yang dihasilkan juga semakin buruk.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Galuh (2012) tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pengaruh yang signifikan positif antara kapasitas SDM terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (2) Pengaruh yang signifikan positif antara pemanfaatan TI terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (3) Pengaruh yang signifikan positif antara pengawasan keuangan daerah terhadap

nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (4) Pengaruh yang signifikan positif antara SPI terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD Kota Payakumbuh).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh?
2. Sejauhmana pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh.
2. pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh.

**D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Penulis, dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pemerintah Kota Payakumbuh, dapat menjadi masukan dalam peningkatan kualitas nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Akademis, menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pelaporan Keuangan Pemerintah**

###### **a. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Jogiyanto (2011) menjelaskan bahwa informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (keterpahaman) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi yang berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Menurut (Arens 2011) Pemanfaatan teknologi informasi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian internal dengan secara konsisten memproses sejumlah besar volume transaksi data sehingga teknologi informasi dapat meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi dari informasi.

Peningkatan kepengendalian internal sebagai hasil pengintegrasian teknologi informasi kedalam sistem akuntansi yaitu kendali komputer menggantikan kendali manual. Satu keuntungan teknologi informasi adalah kemampuan untuk meningkatkan pengendalian internal dengan menggabungkan kendali yang dilakukan komputer dalam aktivitas proses transaksi sehari-hari.

Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002). Untuk itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada publik.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah (Andriani, 2010). Teknologi informasi kiniberkembang dengan pesat sehingga dengan teknologi informasi ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerahserta dapat menyampaikan informasi keuangan daerah kepada publik. Kewajibanpemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah

daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penggunaan teknologi informasi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian internal dengan secara konsisten memproses sejumlah besar volume transaksi data. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Ertambang (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), Andriani (2010), dan Mustafa dkk. (2010) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah

Penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) terhadap sepuluh SKPD di Sumatera Barat tahun 2008 dan 2009, ditemukan bahwa pemahaman staf terhadap pemanfaatan teknologi dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik hardware maupun software dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi yang memadai.

Pengawasan keuangan daerah juga dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo,2006). Hasil penelitian Fikri (2011) pada SKPD Kota Padang, ditemukan lemahnya pengawasan dan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang.

Menurut arens (2011) Pengawasan yang berjalan dengan baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Dimana, pengawasan keuangan daerah merupakan salah satu komponen pengendalian internal yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu beroperasi seperti diharapkan dan mereka dimodifikasi sesuai dengan perubahan dalam kondisi-kondisi. Dalam komponen pengendalian internal yang lain, aktivitas pengendalian, terdapat bentuk aktivitas pengendalian yaitu pemisahan tugas yang berguna untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan usaha untuk menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan tugas oleh orang-orang terkait.

Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata ke-

mudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Pengawasan keuangan daerah pemerintah juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik.

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya pengawasan yang dilakukan akan menyebabkan kelalaian dalam pembuatan pelaporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode. Sedangkan Bastian (2006:247) mendefinisikan laporan

keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

#### **b. Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 1 dalam Harahap (2007:121), Tujuan Laporan Keuangan adalah:

- 1) Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- 2) Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.

- 3) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Mardiasmo (2002:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

- 2) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

- 3) Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4) Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5) Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6) Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2005:56) Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

### **c. Komponen Laporan Keuangan**

Dalam PP No 8 Tahun 2006 laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari:

- 1) Laporan realisasi anggaran;  
Menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.
- 2) Neraca;  
Menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

- 3) Laporan arus kas;  
Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.
- 4) Catatan atas laporan keuangan  
Menyajikan pengungkapan penjelasan yang tidak dimuat pada 3 laporan di atas, seperti metode penyusutan, metode yang dipakai, dan lainnya.

**d. Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Menurut Suwardjono (2004:101) pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara. Sedangkan menurut FASB dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui statement keuangan.

**e. Nilai Informasi**

Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai, sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005).

Dalam PP Nomor 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

a) Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

## 2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

### a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

### b) Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

### c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

## 3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi

yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## **2. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

### **a. Komponen Teknologi Informasi**

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000 dalam Arfianti, 2011). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010) :

- a. pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan
- b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi

suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Wahana Komputer, 2003). Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi.

Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian-pengendalian atas keakurasian data. Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian sistem informasi akuntansi seringkali mengubah karakter aktivitas. Data mungkin dikumpulkan dengan peralatan khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapan-tahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. Output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak.

Yang lebih penting dari semua perubahan ini adalah peningkatan dalam hal (Wilkinson et al., 2000 dalam Arfianti, 2011):

- 1) pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat,
- 2) keakurasian dalam perhitungan dan perbandingan lebih besar,
- 3) kos pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah,
- 4) penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu,
- 5) tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan,
- 6) pilihan pemasukan data dan penyediaan output lebih luas/banyak, dan
- 7) produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan.

Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian *hardware* yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak.

**b. Tingkat Integrasi Teknologi Informasi**

Integrasi adalah suatu upaya untuk melakukan penggabungan dua atau lebih elemen guna menghasilkan inovasi baru. Dengan kata lain bahwa mengintegrasikan teknologi informasi adalah suatu upaya untuk menggabungkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas-tugas dengan menggunakan strategi baru (Yaumi, 2011). Menurut Jurnal dan Supomo (2002) dalam Harifan (2009), pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang terdiri dari:

- 1) Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas
- 2) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja
- 3) Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan
- 4) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi
- 5) Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 6) Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi
- 7) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur

- 8) Peralatan yang usang atau rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya

### **3. Pengawasan Keuangan Daerah**

#### **a. Pengertian**

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari pengertian keuangan negara tersebut di atas, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara dimana “negara” dianalogikan dengan “daerah”. Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula sesuatu baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah.

Menurut Yosa (2010) dalam Arfianti (2011) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah.

**b. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control).

**c. Pengawasan Keuangan Daerah**

Adapun jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara peng-awasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*), atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini, di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
- 3) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya pe-nyimpangan pelaksanaan keuangan negara/daerah yang akan membebankan dan merugikan negara/daerah lebih besar. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan

bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

- 4) Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Yani (2002), ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah yang harus menjadi perhatian untuk pengawasan dalam pelaksanaannya :

- 1) Asas umum pengelolaan keuangan daerah,
- 2) Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah,
- 3) Struktur APBD,
- 4) Penyusunan RKPD, KUA, dan RKA-SKPD,
- 5) Penyusunan dan penetapan APBD,
- 6) Pelaksanaan dan perubahan APBD,
- 7) Penatausahaan keuangan daerah,
- 8) Pertanggungjawaban pengelolaan APBD,
- 9) Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD,
- 10) Pengelolaan kas umum negara,
- 11) Pengelolaan piutang daerah,
- 12) Pengelolaan investasi daerah,
- 13) Pengelolaan barang milik negara,
- 14) Pengelola dana cadangan,
- 15) Pengelolaan utang daerah,
- 16) Pembinaan Pengelolaan keuangan daerah,
- 17) Penyelesaian kerugian daerah,
- 18) Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pengaturan Pengelolaan keuangan daerah.

#### 4. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti (Tahun Penelitian)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Perbedaan Dengan Penelitian Penulis</b>
1. Indriasari (2008)	Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan SPI terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemanfaatan TI dan SPI berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sedangkan kapasitas SDM tidak memiliki pengaruh	Populasi adalah SKPD dengan menggunakan <i>purposive sampling</i> dan jumlah responden 117 bagian akuntansi. Alat analisis adalah analisis faktor	Studi empiris yang berbeda (Pemko Palembang dan Kab Ogan Ilir) serta penulis mengurangi factor kapasitas SDM mencoba menambahkan faktor pengawasan keuangan daerah
2. Harifan (2009)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Padang	Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemda	Populasi pada penelitian ini adalah 43 SKPD Kota Padang dengan Total Sampling, sehingga respondennya berjumlah 86 orang (kepala bagian dan staf akuntansi). Alat analisis yaitu Regresi Berganda	Studi empiris berbeda dan factor SDM tidak ada pada penelitian ini serta penelitian ini menambahkan factor pengawasan keuangan daerah.

Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
3. Fikri (2011)	Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Instansi Pemerintah Kota Padang	SIKD dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dan, Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda melalui SIKD	Populasi penelitian ini berjumlah 42 SKPD dengan <i>judgement sampling</i> dan responden berjumlah 42 kepala bagian akuntansi. Alat analisis yaitu analisis jalur	Variable nya ada yang berbeda dan studi empirisnya juga berbeda
4. Galuh (2012)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening.	Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI, pengawasan keuangan daerah dan SPI berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi.	Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Padang yang berjumlah 45 SKPD dengan <i>totalsampling</i> . Responden berjumlah 90. alat analisis yaitu analisis jalur.	Variable nya ada yang berbeda dan studi empirisnya juga berbeda

## **B. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, adanya pengawasan terhadap keuangan daerah. Suatu laporan keuangan itu berkualitas dan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.

Informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (keterpahaman) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi yang berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, multiprocessing.

Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penggunaan teknologi informasi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian internal dengan secara konsisten memproses sejumlah besar volume transaksi data. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

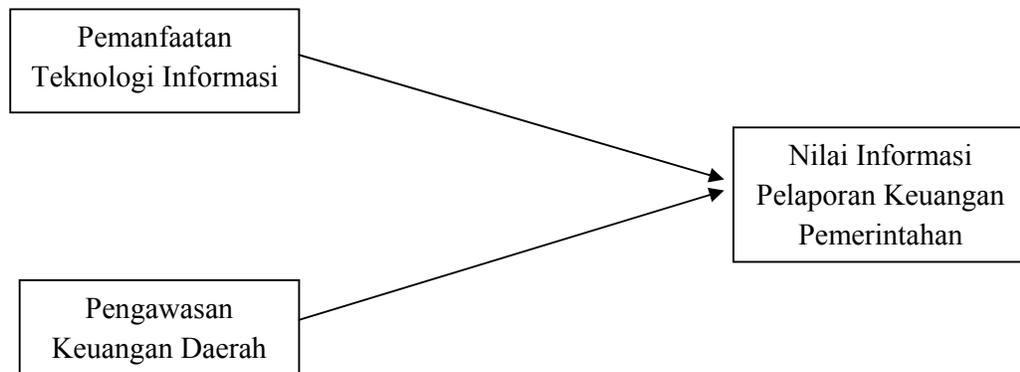
Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Pengawasan keuangan daerah pemerintah juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik.

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi

organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Salah satu komponen pengendalian internal yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian internal.

. Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

### **C. Hipotesis**

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, maka hipotesis yang ingin dibuktikan dari penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh.

H<sub>2</sub> : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah kota Payakumbuh. Di mana, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah ( $H_1$  diterima).
2. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah kota Payakumbuh. Di mana, semakin baik pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah ( $H_2$  diterima).

#### **B. Keterbatasan**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 45,50%

sedangkan sisanya 54,50% ditentukan oleh faktor faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap nilai informasipelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Kuesioner yang peneliti sebarakan masih terdapat banyak keterbatasan, Karena pernyataan didalam kuesioner peneliti hanya menggunakan pernyataan yang bersifat normatif, sehingga responden diarahkan pilihan jawaban yang baik atau positif saja.
3. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis sengan bentuk kuesioner mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya (subjektif) dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara.

### **C. Saran**

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah dalam pemerintahan telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada nilai informasipelaporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai pemanfaatan

teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah dalam pembuatan laporan keuangan agar mempunyai nilai informasi.

2. Rata-rata TCR pada penelitian ini sudah baik. Diharapkan Pemerintah kota payakumbuh dapat mempertahankan TCR tersebut. Namun masih ada TCR yang cukup, diharapkan pemerintah daerah meningkatkan pencapaian tersebut.
3. Penelitian ini masih terbatas pada pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, LKPD Payakumbuh masih WDP diakses melalui [www.padangekspres.co.id](http://www.padangekspres.co.id)
- Arens, Alvin A, Randal J Elder & Mark S Beasley. 2011. *Auditing dan Pelayanan Verifikasi Pendekatan Terpadu*. Jakarta: salemba empat
- Arfianti, Dita.2011.Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD di Kabupaten Batang.*Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Fikri, Miftahul. 2011. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Galuh Fajar Delanno.2012.Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening, skripsi universitas negeri padang.
- Guy, Dan M, C Wayne Alderman, Alan J Winters. 2003. *Auditing*. Jakarta: Erlangga
- Harahap, Syofyan Syafri.2007.*Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Harifan, Handriko.2009.Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Padang.*Skripsi*.Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Indriasari, Desi.2008.Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.*Jurnal SNA*. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang
- Jogiyanto Hartono, 2011. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*. Yogyakarta : BPFE
- Mardiasmo. 2006. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi